

Kajian Neraca Perdagangan *Volatile Food* di  
Jawa Barat  
(Survey pada Tujuh Kota)

LAPORAN AKHIR

Ketua : Dr. Atih Rohaeti Dariah SE., MSi  
Anggota : Prof. Dr. Muhardi, SE., MSi  
Tasya Aspiranti, SE., M.Si  
Lilis Yulifah, SE., MSi  
Septiana A. Estri Mahani, SE., Msi



KERJASAMA  
KANTOR BANK INDONESIA BANDUNG  
FAKULTAS EKONOMI UNISBA

2009

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur, kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Ridho-Nya kami dapat menyelesaikan laporan akhir dari penelitian yang berjudul "**Kajian Neraca Perdagangan Komoditas *Volatile Food* di Jawa Barat (Survey pada tujuh kota)**". Kami mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan Bank Indonesia Bandung mendanai kegiatan penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui neraca perdagangan komoditas *volatile food* di tujuh kota, memetakan lalu lintas 9 komoditas *volatile food* di Jawa Barat, mengetahui model arus distribusinya, menghitung efisiensi distribusi pada setiap simpul distribusi dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada Pemda dan pihak-pihak terkait dalam rangka pengendalian harga komoditas *volatile food* di Jawa Barat.

Dalam laporan akhir ini, kami sajikan dalam enam bab. Bab I, Pendahuluan; Bab II, Studi Literatur Tentang Distribusi; Bab III, Neraca Perdagangan *Volatile Food* di Jawa Barat; Bab IV, Peta Lalu Lintas Komoditas *Volatile Food* di Jawa Barat; Bab V Model Arus Distribusi; Bab VI Efisiensi Distribusi; Bab VII Kesimpulan dan Saran. Dalam laporan akhir ini, kami sampaikan beberapa temuan hasil survey dan perhitungan terkait dengan tingkat efisiensi distribusi. Mudah-mudahan penelitian ini, dapat memberikan manfaat baik untuk Bank Indonesia sebagai regulator, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Amiiin.

Bandung, 26 Januari 2009

Tim Peneliti

Fakultas Ekonomi Unisba

## EXECUTIVE SUMMARY

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui neraca perdagangan 9 komoditas *volatile food* di tujuh kota Jawa Barat, metakan lalu lintas 9 komoditas *volatile food* di Jawa Barat, mengetahui model arus distribusinya, menghitung efisiensi distribusi pada setiap simpul distribusi dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada Pemda dan pihak-pihak terkait dalam rangka pengendalian harga komoditas *volatile food* di Jawa Barat.

Terdapat 4 indikator efisiensi distribusi untuk setiap komoditas, yakni: pertama panjang rantai distribusi dari produsen sampai ke pengecer yang menunjukkan jumlah pelaku pasar/simpul dalam rantai distribusi. Kedua, Nilai Rasio Margin Distribusi (*Distribution Margin Ratio*) yang menunjukkan perbandingan antara net profit dengan selisih harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen pada setiap simpul. Ketiga, Nilai Rasio Profit Biaya (*Cost Profit Ratio*) atau Efisiensi Operasional yang menunjukkan perbandingan antara net profit dengan keseluruhan biaya operasional pada setiap simpul. Keempat, Nilai Rasio Bagian Petani Produsen (*Farmer's Share*) yang menunjukkan perbandingan antara harga jual di simpul petani produsen dengan harga jual di tingkat pengecer (simpul akhir) pada setiap rantai distribusi. Semua indikator dikelompokkan menggunakan skala ordinal sesuai klasifikasinya masing-masing. Untuk panjang rantai, skor 1 jika panjang rantai 1 sampai 2, skor 2 jika panjang rantai 3 sampai 4, skor 3 jika panjang rantai 5 dan selebihnya. Skoring untuk DMR dan CPR berdasarkan pendekatan kurtosis. Jika nilai kurtosis lebih besar dari 3 diberi skor 1, sama dengan 3 diberi skor 2, dan lebih kecil dari 3 diberi skor 3. Sementara untuk indikator FS, jika lebih besar dari 50% diberi skor 1, sama dengan 50% diberi skor 2, dan lebih kecil dari 50% diberi skor 3. Klasifikasi efisiensi distribusi mengacu pada rentang interval yakni 1 – 1,66 efisien, interval 1,67 – 2,33 kurang efisien, dan interval 2,34 – 3 tidak efisien.

Seluruh kota yang disurvei secara umum sangat tergantung pada luar daerah dalam memenuhi kebutuhan 9 bahan makanannya. Sumber pasokan komoditas bahan makanan tersebut bervariasi yang terkait erat dengan karakteristik wilayah dan jenis produk. Hasil survey menginformasikan bahwa terdapat 5 pola sumber pasokan untuk 9 komoditas bahan makanan, yakni: dari sentra produksi, dari petani daerah sekitar yang bukan merupakan sentra produksi, dari pasar induk di kota lain, dari distributor utama di luar daerah, dari produsen lokal. Sentra produksi untuk komoditas tertentu seperti bawang

merah, telur ayam dan cabe merah berada di luar Jawa Barat yakni Brebes, Losari, Nganjuk dan Blitar. Pedagang Besar Antar Kota (PBAK) untuk komoditas ini telah memiliki jalur distribusi ke pasar induk kota-kota tertentu, sehingga kota-kota lainnya seperti Kota Sukabumi dan Depok menggantungkan pasokan bawang merah dan cabe merah dari pasar induk Kota Bandung dan Bogor. Minyak goreng berasal dari pabrik pengolahan CPO di Jakarta dan Bekasi yang terkoneksi dengan pengolahan sawit di daerah Sumatera. Sedangkan tahu diproduksi secara lokal.

Pola sumber pasokan menentukan model arus distribusi sehingga terbentuk 5 model arus distribusi, yakni: Model Bandar, Model PBAK, Model Mix Bandar dan PBAK, Model Produsen, Model Distributor. Hasil survey ke-9 komoditas di 7 kota menunjukkan terdapat varians untuk setiap model namun tidak menambah pelaku rantai, yang membedakannya terletak pada hubungan yang *direct* dan *indirect* antar level. Kasus telur dan daging ayam yang menguasai pasar-pasar kota besar cenderung membuat pasar terintegrasi dengan pasar di kota lainnya untuk komoditas tersebut. Secara umum terdapat konsistensi antara pola sumber pasokan dengan model arus distribusi, kecuali untuk kol dan ikan mas yang kedua-duanya berasal dari sentra produksi namun tidak mengikuti model PBAK. Karakteristik komoditas ikan yang sangat sensitif jika banyak berpindah tangan dan lokasi sentra produksi kol yang masih dalam satu provinsi berimplikasi pada peran bandar yang sekaligus mendistribusikan atau grosir yang langsung datang ke lokasi.

Hasil perhitungan efisiensi distribusi berdasarkan indikator panjang rantai, DMR, CPR dan Farmer's share atau Producer's share memperlihatkan bahwa hanya komoditas tahu yang terklasifikasikan efisien. Hal ini bisa terjadi karena rantai distribusi sangat pendek, sebaran DMR dan CPR cukup merata di sebagian besar kota yang disurvei, besamya producer's share di atas 50% di seluruh kota. Sedangkan telur dan daging ayam terklasifikasikan kurang efisien. Kedua komoditas tersebut memiliki rantai yang panjang, sebaran DMR dan CPR yang tidak merata, namun ternyata nilai Farmer's share di atas 50%. Produksi komoditas ikan mas pada saat musim hujan dapat terkategori kurang efisien pula. Artinya pelaku di hulu yakni peternak ayam, telur dan ikan mampu memperoleh harga jual yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki posisi tawar yang cukup baik mengingat produk tahan lama, bandar tergantung pada peternak (untuk kasus peternak mandiri) dimana kesinambungan pasokan sangat diharapkan karena permintaan pasar tinggi. Selain itu karena fenomena pola peternakan

menganut kemitraan inti plasma dimana pemilik modal sekaligus pemasar. Selanjutnya komoditas kol, bawang merah, cabe merah, pisang, minyak goreng dan ikan mas (disaat musim kemarau), terklasifikasikan tidak efisien. Hal ini bisa terjadi karena komoditas-komoditas tersebut terutama komoditas pertanian memiliki rantai yang panjang, sebaran DMR dan CPR yang sangat tidak merata, nilai Farmer's share di bawah 50%. Dikaitkan dengan pola sumber pasokan, komoditas pisang dan daging ayam dipasok oleh daerah pinggiran kota. Namun ternyata kedekatan lokasi tidak menjamin efisiensi distribusi. Elaborasi dibalik fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan bandar dan atau PBAK yang mampu mengumpulkan komoditas dari banyak petani dan memasarkannya ke grosir kota tujuan, merupakan pelaku rantai yang menguasai informasi baik sisi supply maupun demand. Sementara posisi petani sangat lemah, dalam kondisi skala produksi rendah dan pola bertani individu, mereka tergantung terhadap bandar tidak hanya pasar namun juga pengadaan input-input produksi.

Dibalik angka-angka indikator efisiensi distribusi terdapat fenomena yang memberikan informasi penting yang terkait erat dengan struktur biaya dan determinan utamanya, sebagaimana dijabarkan dalam poin-poin berikut ini. Pertama, model arus distribusi komoditas pertanian banyak melibatkan pelaku sehingga rantai panjang dan konsekuensinya harga yang sampai di tingkat pengecer semakin tinggi. Bandar dan atau PBAK merupakan aktor rantai penentu harga transaksi berdasarkan kondisi permintaan dan penawaran. Mereka memiliki informasi lengkap terkait dengan kondisi permintaan di pasar kota besar dan sinyal-sinyal di tingkat produsen. Informasi tersebut ditransmisikan dengan sempurna ke grosir yang berada di daerah, artinya terjadi integrasi pasar antara pasar di kota besar dengan pasar-pasar lokal di daerah. Dengan demikian intensitas kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan yang secara langsung menaikkan permintaan sementara penawaran tetap akan mempengaruhi kenaikan harga. Demikian halnya sinyal kenaikan biaya produksi, cuaca yang tidak menentu, musim, gagal panen yang mengisyaratkan kelangkaan pasokan akan ditransmisikan oleh bandar atau PBAK melalui kenaikan harga dalam kondisi permintaan tetap. Sebaliknya, ketika panen raya bersamaan antar daerah sehingga pasokan berlimpah sementara permintaan tetap, harga anjlok bahkan nol. Kenaikan biaya transportasi yang dihadapi bandar dan PBAK pun termasuk item yang mempengaruhi mereka menaikkan harga jual. Meskipun demikian ternyata mereka memiliki margin distribusi terendah diantara pelaku pemasaran lainnya khususnya

kasus komoditas ikan, bawang merah, cabe merah, pisang dan minyak goreng, disebabkan ketatnya persaingan untuk penjualan di level ini terutama di sentra – sentra produksi atau di pusat distribusi untuk minyak curah. Bandar/PBAK hanya dapat mengambil margin pemasaran yang rendah di level ini, karena produsen mempunyai banyak pilihan konsumen (sangat banyak Bandar/ Distributor yang bertransaksi pada sentra produksi untuk komoditas – komoditas ini). Meskipun demikian karena skala operasi mereka besar, maka secara keseluruhan total penerimaan pun besar.

Kedua, peternakan ayam di Jawa Barat didominasi oleh pola kemitraan inti plasma antara pemilik modal dengan para peternak, dimana inti bertindak sebagai penyedia sapronak (DOC, pakan, vaksin dan obat –obatan) dan menangani pemasaran hasil panen. Mekanisme kemitraan seluruhnya ditentukan oleh perusahaan inti (meliputi syarat menjadi peternak plasma, penetapan harga sapronak dan hasil panen, penentuan bagi hasil, pemberian bonus dan sanksi), sedangkan peternak plasma menyediakan kandang dan peralatan produksi serta melakukan pemeliharaan ternak. Ternyata, margin distribusi terendah di tingkat produsen terjadi pada komoditas daging dan telur ayam, disebabkan skala operasi (ternak) yang besar, maka profit dapat diperoleh dari harga jual rendah. Jika margin tinggi pada level ini, mengakibatkan risiko produk tidak memiliki daya saing untuk dapat diserap pasar (kalah bersaing dengan peternak dari sentra produksi lain). Meskipun demikian, jika tidak memenuhi skala operasi (ternak) minimum (terutama peternak mandiri) dan kondisi penyakit hewan dan cuaca, margin dapat negative.

Ketiga, dalam produksi bahan makanan kecuali tahu dan minyak goreng masih terjadi ketergantungan petani dan peternak kepada bandar berupa akses modal biaya produksi dan penjualan. Dibalik ketergantungan tersebut, bandar mengabaikan kontribusi nilai tanah dan tenaga kerja petani. Para bandar memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan petani. Kesulitan akses modal pun dirasakan oleh produsen tahu lokal sehingga menghambat ekspansi usahanya. Meskipun demikian, produsen tahu memiliki nilai DMR tertinggi diantara produsen lainnya karena rantai pemasaran yang paling pendek.

Keempat, biaya produksi tidak selalu menentukan harga jual komoditas di tingkat produsen. Hal ini terjadi ketika sinyal pasar yang ditransmisikan oleh bandar begitu kuat berdasarkan penguasaan informasi pasar seperti kasus di petani kol. Margin distribusinya terendah bahkan negative, disebabkan seringnya panen bersamaan di setiap tempat maka

terjadi excess supply komoditas ini yang menyebabkan petani kol hampir selalu merugi (dengan menjual di bawah harga produksi).

Kelima, terdapat perbedaan besaran biaya produksi yang mencolok antar daerah yang terjadi untuk komoditas ikan mas antara sentra Cirata dan petani lokal di Kabupaten Cirebon. Konsekuensinya harga eceran ikan mas di Kota Cirebon lebih tinggi sebesar 20% dari kota-kota lainnya. Margin distribusi tertinggi di produsen (petani ikan), disebabkan terdapat rantai distribusi ikan yang sangat pendek di kota Cirebon yang masih menghasilkan ikan lokal.

Keenam, spesialisasi komoditas di sentra produksi cabe merah dan bawang merah di Brebes yang mengadopsi sistem monokultur dalam jangka panjang telah menimbulkan degradasi lahan sehingga kebutuhan input menjadi lebih besar. Konsekuensinya biaya produksi tinggi yang gilirannya menentukan harga jual di pedagang eceran.

Ketujuh, fluktuasi harga input seperti kedele, anak ayam (doc), pakan ternak, pupuk, obat-obatan berdampak pada fluktuasi harga jual tahu, daging ayam, telur, bumbu-bumbuan. Harga pakan ternak dan kedele yang sebagian besar diimpor terkait erat dengan fluktuasi nilai kurs.

Kedelapan, fluktuasi harga di tingkat pengecer terkait erat dengan karakteristik komoditas yang cepat busuk (kol, cabe merah, tahu, pisang), menyusut (ayam, bawang merah), sensitif (ikan, telur). Pedagang eceran yang banyak menghadapi saingan terutama para PKL di pinggir jalan mendorong perilaku melakukan substitusi harga antara komoditas yang cepat busuk dengan komoditas lainnya. Jadi dalam kondisi pasar normal mereka cenderung menurunkan harga komoditas yang cepat busuk tapi menaikkan harga komoditas lainnya yang masih segar. Tidak mengherankan margin distribusi tertinggi di pengecer terjadi pada hampir semua komoditas, disebabkan skala operasi jual yang kecil, biaya operasional transportasi, penyusutan, *grading* dan tenaga kerja yang tinggi sehingga untuk mendapatkan profit yang memadai harus dilindungi dengan harga jual yang cukup tinggi.

Hasil penelitian merekomendasikan banyak kebijakan seperti: pertama, setiap pemerintah daerah kota seyogianya memiliki informasi terkait neraca perdagangan yang mencakup data produksi, konsumsi dan arus distribusi secara lengkap dan rutin dalam rangka minimalisasi asimetrik informasi. Kedua, pemerintah provinsi seyogianya